

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

1. Abdul Wahab, S. Analisis Kebijakan Publik Teori dan Aplikasinya. Malang. PT Dinar Wijaya, 1999
2. Abdul Wahab, S. Analisis Kebijaksanaan dan Formulasi ke Implementasi. Kebijaksanaan Negara, Jakarta: Bumi Aksara, 1997
3. Abidin, Said Zainal, Kebijakan Publik. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah, 2004
4. Alwasilah, Chaedar A. *Pokoknya Kualitatif. Dasar-dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya, 2002
5. Amal, Ichlasul. "Sistem Pemerintahan RI." Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 2004
6. Anderson, James E. *Public Policy Making*. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1979
7. Arsyad, Lincolin. Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah. Yogyakarta: BPFE, 1999
8. Assidiqie, Jimly. *Etika Birokrasi Penegakan Hukum Dan "Good Governance"*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 2004
9. Badjuri, Abdul Kahar dan Teguh Yuwono_ Kebijakan Publik: Konsep dan Strategi. Semarang: Universitas Diponegoro, 2002
10. Chaniago, Andrinof A. Gagalnya Pembangunan: Kajian Ekonomi Politik terhadap Akar Krisis Indonesia. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2001
11. Conside, Mark. 1994. *Public Policy: A Critical Approach*. Melbourne: McMillan
12. Dirdjojuwono, Roestanto W. Kawasan Industri Indonesia: Sebuah Konsep Perencanaan dan Aplikasinya. Bogor: Pustaka Wirausaha Muda, 2004
13. Djajadiningrat, Suma T., dan Melia Famiola. Kawasan Industri Berwawasan Lingkungan (*Eco-Industrial Park*). Bandung: Penerbit Rekayasa Sains, 2004
14. Dunn, William N. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Edisi Kedua. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003
15. Dwijowijoto, Riant Nugroho. Kebijakan Publik: Formulasi, implementasi dan Evaluasi. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2004
16. Dwiyanto, Agus, 2002, Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM
17. Dye, Thomas R. *Understanding Public Policy Analysis: an Introduction*. Second Edition (terjemahan), Yogyakarta: Penerbit Gadjah Mada University Press, 1978
18. Edwards III, George C. *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Inc, 1980
19. Effendi, Sofyan. 2004. "Paradigma Pembangunan Kelembagaan publik Dan Reinventing Government." Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
20. Fujita, M., *The Spatial Economy: Cities, Regions, and International Trade*. Cambridge and London: The MIT Press, 1999
21. Gibson, J.L. Ivancevich dan JH. Donnely. 1985. *Organisasi dan Manajemen: Perilaku, Struktur, Proses*. Editor: Agus Dharma. Jakarta: Erlangga.

22. Grindle, Merilee S. *Politics and Policy Implementation in the Third World*. New Jersey: Princeton University Press, 1980
23. Gunn, W. N. 1981. *Public Policy Analysis: An Introduction*. New Jersey: Prentice Hall.
24. Hartarto, Airlangga. *Strategi Clustering dalam Industrialisasi Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Andi. 2004
25. Hogwood, Brian W., and Lewis A. Gunn. *Policy Analysis for the Real World*. Oxford University Press, 1986
26. Ibrahim, Amin. *Pokok-pokok Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2004
27. Irawan, Prasetya. *Logika dan Prosedur Penelitian*. Jakarta: STIA-LAN, 1999
28. Islamy, M. Irfan. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003
29. Kementerian Lingkungan Hidup. 1997. *Agenda 21 Indonesia*. Jakarta: Kementerian Negara Lingkungan Hidup.
30. Mazmanian, Daniel A, *Implementation and Public Policy*. USA: Scott Foresman and Company, 1983
31. Milton J. Esman. 1986. *Unsur Unsur Dari Pembangunan Lembaga*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia
32. Moeljarto T. 1985. *Politik Pembangunan: Sebuah Analisis Konsep, Arah dan Strategi*. Yogyakarta: Penerbit Tiara Wacana
33. Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdyakarya, 2002
34. Muluk, Khairul. *Menggugat Partisipasi Publik dalam Pemerintahan Daerah*, Malang, Bayumedia Publishing, 2007
35. Mulyana, Dedy. 2001. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Rosda.
36. Mustopadidjaja AR,. 2000. *Perkembangan Penerapan Studi Kebijakan*. Jakarta: LAN.
37. Mustopadidjaja AR,. 2003. *Manajemen Proses Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi Kinerja*, LAN RI Jakarta: Duta Pertiwi Foundation
38. Nakamura, Robert T., *The Politics of Policy Implementation*. USA: St. Martin's Press, 1980
39. Nugroho, Riant, D. 2001. *Reinventing Indonesia*. Jakarta: Elex Media Komputindo
40. Parsons, Wayne. 1997. *Public Policy: An Introduction to the Sagala*, Arryanto, *Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Industri*. Jakarta: BPPT Press, 2004
41. *Theory and Practise of Police Analysis*. Edward Elgar, Cheltenham, UK Lyme. US.
42. Setyawati, Endarti Budi dan Hessel Nogi S. *Tangkilisan. Responsivitas Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Wonderful Publishing Company, Tanpa Tahun
43. Sitorus, Parlin. *Teori Lokasi Industri*. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 1997

44. Sjahrir, Kebijakan Negara. Konsistensi dan Implementasi, LP3ES, 1987; cetakan kedua LP3ES, 1988.
45. Soenarko. 1998. Kebijakan Pemerintah. Surabaya: Papyrus
46. Subarsono, AG. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005
47. Sugiyono. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: CV Alfabeta, 2004
48. Suhady Dkk. 2004. Fokus Dan Solusi Menuju Terwujudnya Good Governance. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
49. Sumaryadi, I. Nyoman. Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah. Jakarta: Depok Citra Utama, 2005
50. Sunggono, Bambang. Hukum dan kebijakan Publik. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 1994
51. Sutojo, Siswanto & Aldridge, . Jhon. Good Corporate Governance (*Tata Kelola Perusahaan Yang Sehat*), Jakarta:PT Damar Mulia Pustaka, 2005
52. Suwaryo, Utang, 2005. *Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah (Studi Kasus Tentang Kewenangan Dalam Aplikasi*
53. Tambunan, Tulus T.H. Industrialisasi di Negara Berkembang Kasus Indonesia. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2001
54. Tjandra, Riawan. Dinamika Peran Pemerintah dalam Perspektif Hukum Administrasi. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2004
55. Wahab, Solichin Abdul. Analisis Kebijakan: dare Formulas/ ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara, 2004
56. Wibawa, Samudera. Evaluasi Kebijakan Publiik. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994
57. Widodo, Joko. 2001. Good Governance. Surabaya: Insan Cendekia.
58. Winarno, Budi. Kebijakan Publik, Teori & Proses, edisi revisi, Penerbit Media Pressindo. Yogyakarta: Media Pressindo, cetakan pertama, 2007
59. Rachman, Syaiful, "Pembangunan dan otonomi daerah", Penerbit Yayasan Pancur Siwah, 2004
60. Said, M.M., 2005, Arah Otonomi Daerah di Indonesia, Malang: UMM Press
61. Fukuyama, Francis, 2005. Memperkuat Negara: Tata Pemerintahan dan Tata Dunia Baru Abad 21. Jakarta: Gramedia, Pustaka Utama

Bahan Publikasi, Artikel, Jurnal :

1. Timoticin Kwanda dalam "Pengembangan Kawasan Industri di Indonesia" Dimensi Teknik Arsitektur Vol. 28, No. 1, Juli 2000:54-61
2. Jurnal Yustisia Edisi No. 69 Sept-Des 2006
3. Arryanto Sagala, dkk:"Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Industri". BPPT Press, Jakarta 2004
4. Pujiyono dalam Struktur Organisasi Birokrasi daerah yang ideal berdasarkan PP No. 8 Thn 2003, Yustisia Edisi No. 69 Sept-Des 2006
5. Bappenas: Buku Pegangan 2007 Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah

6. Bintoro Tjokroamidjojo, "Analisis Kebijaksanaan dalam proses Perencanaan Pembangunan Nasional", Majalah Administrator, No. 5 & 6 tahun IV, 1979
7. Bambang Supriyadi dalam Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Sektor Informal (Studi Kasus Implementasi Perda No 17 Tahun 2003 tentang Pembinaan PKL di Kota Surabaya), PPS Unibraw Malang, 2007
8. RPJMP Kabupaten Karawang
9. RKPD Kabupaten Karawang

Laman/Website:

1. www.karawangkab.go.id
2. <http://bussinessenvironment.wordpress.com/2006/10/04/strategi-investasi-untuk-menarik-investor/>
3. http://id.wikipedia.org/wiki/Sumber_daya_manusia
4. www.setneg.go.id

Peraturan dan Perundang-undangan :

1. Undang-undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
4. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1996 tentang Kawasan Industri kemudian diperbarui oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009
5. Peraturan daerah Kabupaten Karawang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten karawang

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana kebijaksanaan Pemerintah daerah kabupaten karawang terhadap pengembangan kawasan industri
2. Apakah bentuk kebijakan yang telah dibuat
3. Apa dasar kebijakan tersebut
4. Mengapa kebijakan tersebut dibuat
5. Instansi manakah yang terlibat dalam penyusunan kebijakan tersebut
6. Bagaimana proses kebijakan tersebut diibuat sehingga dapat dilaksanakan
7. Instansi mana saja yang terlibat dalam pelaksanaan (implementasi) kebijakan pengembangan Kawasan Industri
8. Masalah dan hambatan apa yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijaksanaan tersebut
9. Apa bentuk pelayanan publik yang diberikan kepada dunian usaha dan masyarakat
10. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pembangunan dan pengembangan kawasan industri
11. Apa keuntungan dan kerugian bagi masyarakat sekitar dengan adanya kawasan industri
12. Manfaat apa yang diperoleh masyarakat dengan berkembangnya kawasan industri